

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintah yang bersih menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, sehingga terwujudnya *clean governance and good governance* di Indonesia yang semakin meningkat. Semakin meningkatnya juga tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintah yang bersih menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota.

Salah satu unit yang melakukan audit terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah, yang disebut juga sebagai auditor internal sektor publik. Inspektorat sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat menekankan pada pemberian bantuan kepada unit kerja perangkat daerah dalam melakukan pengelolaan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian misi dan tujuan, sekaligus memberikan alternatif peningkatan efisiensi dan efektivitas serta pencegahan atas potensi kegagalan sistem manajemen pemerintahan daerah (Machmud, 2006).

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Suatu instansi jika ingin maju atau berkembang maka dituntut untuk memiliki pegawai yang berkualitas. Pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang kinerjanya dapat memenuhi target atau sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Suatu instansi memerlukan penerapan kinerja untuk memperoleh pegawai yang memiliki kinerja baik. Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Menurut Hasibuan (2009) prestasi kerja atau kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan

kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Akan tetapi kinerja juga dapat diartikan suatu hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh individu dimana dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu dan menggunakan waktu tersebut seefisien mungkin untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dapat memenuhi kualitas, kuantitas dan tepat waktu. Kualitas kerja yakni mutu kerja auditor, kuantitas kerja yakni hasil kerja auditor dan tepat waktu yakni kesesuaian waktu yang telah ditentukan. Maka itu kinerja auditor sangat penting bagi profesinya. Kinerja seseorang dapat dipengaruhi beberapa faktor menurut Gibson (2007) ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu: 1) faktor individu yaitu kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang, 2) faktor psikologi yaitu: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja, dan 3) faktor organisasi yaitu struktur organisasi, design pekerjaan, kepemimpinan dan sistem penghargaan. Banyaknya kasus auditor yang menyampingkan faktor-faktor berhubungan dengan kinerja mengakibatkan kinerja auditor turun dan kepercayaan publik menurun.

Kinerja auditor ditentukan dari sikap-sikap yang ada dalam diri auditor itu sendiri, salah satunya adalah sikap independensi. Independensi umumnya didefinisikan dengan mengacu kepada kebebasan dari hubungan (*freedom from relationship*) yang merusak atau tampaknya merusak kemampuan akuntan untuk menerapkan obyektivitas. Selain itu, terdapat

pengertian lain tentang independensi yang berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Independensi memiliki arti bahwa seorang akuntan publik harus jujur tidak hanya terhadap manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi terhadap kreditur dan pihak lain yang dimana mereka meletakkan keyakinan pekerjaan mereka pada akuntan publik. (Christiawan, 2002 dalam Putri dan Suputra 2013). Independensi harus dipandang sebagai salah satu ciri auditor yang paling penting. Alasannya adalah begitu banyak pihak yang menggantungkan kepercayaannya kepada kelayakan laporan keuangan berdasarkan laporan auditor yang tidak memihak. Independensi dan Profesionalisme.

Selain independensi sikap profesionalisme seorang auditor sangat berperan penting dalam pemeriksaan laporan keuangan. Profesionalisme berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan, sebagai seorang yang professional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidak jujuran. Seorang akuntan yang profesional seharusnya tidak menggunakan pertimbangannya hanya untuk kepuasan auditan. Dalam realitas auditor, setiap pertimbangan mengenai kepentingan auditan harus disubordinasikan kepada kewajiban atau tanggung jawab yang lebih besar yaitu kewajiban terhadap pihak-pihak ketiga dan kepada publik. Prinsip kunci dari seluruh gagasan profesionalisme adalah bahwa seorang profesional memiliki pengalaman dan kemampuan mengenali/memahami bidang tertentu yang lebih tinggi dari auditan. Oleh

karena itu, profesional tersebut seharusnya tidak mensubordinasikan pertimbangannya kepada keinginan auditan.

Pengalaman kerja erat kaitannya dengan lama masa kerja dan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan auditor. Semakin lama masa kerja sebagai auditor maka akan mempengaruhi dalam profesionalitasnya. Pengalaman merupakan salah satu sumber peningkatan keahlian auditor yang dapat berasal dari pengalaman-pengalaman dalam bidang audit dan akuntansi. Pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang dalam melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya. Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa berupa pemberian pendapat.

Selain independensi, profesionalisme dan pengalaman kerja faktor yang berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam penelitian ini adalah etika profesi. Etika profesi merupakan ilmu tentang penilaian hal yang baik dan hal yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Guna meningkatkan kinerja auditor, maka auditor dituntut untuk selalu menjaga standar perilaku etis. Kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis berhubungan dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap peran profesi akuntan, khususnya atas kinerja akuntan publik. Auditor yang mampu menjalankan etika profesinya dengan baik maka dia akan bekerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan kode

etik yang berlaku sehingga auditor dapat meningkatkan kinerjanya dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Pentingnya penelitian ini yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh independensi, profesionalisme, pengalaman dan etika profesi terhadap kinerja auditor pemerintah. Selain itu pentingnya penelitian ini juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh independensi, profesionalisme, pengalaman dan etika profesi terhadap kinerja auditor pemerintah pada kantor Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat sebagai audit internal pemerintah seharusnya dapat menghasilkan kinerja auditor yang baik agar tidak terjadi korupsi atau kecurangan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Suputra (2013) menunjukkan bahwa independensi dan etika profesi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja auditor, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gustia Nila (2014) yang menunjukkan bahwa independensi dan etika profesi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja auditor. Adanya perbedaan di antara hasil penelitian tersebut, penulis melakukan penelitian dengan mengembangkan penelitian yang dilakukan Putri dan Suputra (2013) dengan menambah satu variable pengalaman dari penelitian Muliani et all (2015). Selain itu perbedaan juga terletak pada obyek penelitian, penelitian yang dilakukan Putri dan Suputra (2013) serta Muliani et all mengambil obyek pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.

Penelitian terhadap kinerja auditor pemerintah sebelumnya telah banyak dilakukan, tetapi memperoleh hasil yang berbeda dan tidak konsisten.

Berdasarkan masalah yang ada tersebut maka diajukan penelitian dengan judul **“PENGARUH INDEPENDENSI, PROFESIONALISME, PENGALAMAN, DAN ETIKA PROFESI TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh Independensi, Profesionalisme, Pengalaman dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh indenpendensi terhadap kinerja auditor pemerintah?
2. Bagaimana pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor pemerintah?
3. Bagaimana pengaruh pengalaman terhadap kinerja auditor pemerintah?
4. Bagaimana pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini digunakan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh indenpendensi terhadap kinerja auditor pemerintah.

2. Mengetahui bagaimana pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor pemerintah.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh pengalaman terhadap kinerja auditor pemerintah.
4. Mengetahui bagaimana pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menjadi tambahan referensi atau rujukan mengenai Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Pengalaman dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah pada Kantor Inspektorat.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi Badan Pengawas Keuangan RI dan pihak – pihak yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan – kebijakan terkait dengan Independensi, Profesionalisme, Pengalaman dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah pada Kantor Inspektorat.

E. Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tinjauan pustaka yang dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai data yang digunakan, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan dan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan hasil dan saran serta hasil penelitian.